

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA
(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan,
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)**

Ibrahim Imron, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ibrahim.imron@yahoo.co.id

Abstract : *Community Empwerment Trugh Business Group (Case Study Of Business Group In Dawuhan Village, District Poncokusumo, Malang Regency). This research aims to describe the dimensions of (1) Institutional Capacity Business Groups (2) Development Productive Economic Business (PEB) in Business Groups. This research was conducted in the village of Dawuhan with research object 10 Business Group. This research using qualitative method with descriptive approach. From this research results that (1) The type of productive economic activities in business groups is a cattle farm which still in nature sideline, while for the care and breeding done separately (2) For institutional strengthening, namely by increasing the leadership, while in financial administration has been transparent and accountable. Advice can be given to an increase in productive economic activities with business groups is to improve the care system, the breeding and marketing of products, while for institutional financial manager is to make unit groups as a means of development capital that can be used to vary the type of business.*

Keywords: *empowerment , business group, Productive Economy Bussines(PEB)*

Abstrak : **Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang).** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai dimensi (1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini dilakukan di Desa Dawuhan dengan Obyek penelitian 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah peternakan sapi yang sifatnya adalah usaha sampingan karena pekerjaan mayoritas masyarakat adalah buruh tani, sementara untuk perawatan dan pengembangbiakkannya dilakukan secara terpisah (2) Untuk penguatan kelembagaan yaitu dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok, sedangkan dalam administrasi keuangan sudah bersifat transparan dan mempunyai akuntabilitas. Saran yang dapat diberikan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama adalah memperbaiki sistem perawatan dan pengembangbiakan serta pemasaran hasil produksi, sementara untuk kelembagaannya adalah membuat unit pengelola keuangan kelompok sebagai sarana pengembangan modal usaha sehingga bisa digunakan untuk memvariasikan jenis usaha.

Kata kunci : pemberdayaan, Kelompok Usaha Bersama, Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, baik pada tatanan sosial ekonomi maupun budaya namun demikian hasil kegiatan pembangunan belum dapat menghilangkan masalah kemiskinan secara

menyeluruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup tingginya angka kemiskinan di Indonesia yaitu 14 persen pada tahun 2009 (www.bkkbn.go.id) yang juga mengakibatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia masih tinggi.

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2011, tiga peringkat kemiskinan terbesar di Indonesia terdapat di pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 4.648.630 jiwa, Jawa Tengah 5.107.360 jiwa dan Jawa

Timur 5.356.210 jiwa, dimana Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. (www.bps.go.id). Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa ini memuntut pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk bekerja lebih keras lagi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Pada Tahun 2009-2011

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (000) | |
|-------|------------------------------|----------|
| | Kota | Desa |
| 2009 | 2.148,5 | 3.874,1 |
| 2010 | 1.873,5 | 3.655,8 |
| 2011 | 1.768,23 | 3.587,98 |

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rupiah)/Bulan | | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%) | | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%) | |
|-------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| | Kota | Desa | Kota | Desa | Kota | Desa |
| | 2009 | 202.624 | 174.628 | 2,18 | 3,54 | 0,60 |
| 2010 | 213.383 | 185.879 | 1,53 | 3,18 | 0,37 | 0,79 |
| 2011 | 234.546 | 206.275 | 1,51 | 2,96 | 0,34 | 0,72 |

Sumber : www.bps.go.id

Menurut data tersebut indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa lebih besar dibandingkan di kota, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di daerah pedesaan harus lebih intensif.

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*). Ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara, yaitu pertumbuhan, *welfare state*, neo ekonomi, *structuralize* dan *humanizing*. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu: pertumbuhan, kesejahteraan, dan *people centered*. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah

paradigma "*people centered development*" (Ginandjar, 1996).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan dan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat, disamping itu juga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program asistensi kesejahteraan sosial keluarga. Sedangkan dalam perkembangannya Kementerian Sosial melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) sebagai tindak lanjut dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) atau program KUBE ini, dimana program ini ditujukan untuk KUBE tumbuh yang pernah dibentuk atau diberdayakan oleh dinas sosial provinsi maupun kab/kota. Program yang memberikan bantuan berupa uang sebesar 30.000.000 rupiah untuk masing-masing kelompok usaha bersama yang disalurkan melalui perbankan.

Pada tahun 2011, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusomo, Kabupaten Malang menjadi sasaran dari Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang berasal dari Kementerian Sosial ini. Program BLPS yang diberikan kepada 10 Kelompok Usaha Bersama yang terpilih dari 30 kelompok usaha bersama yang telah terbentuk pada saat Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) tahun 2009 ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Definisi pembangunan menurut Nasution (1988, h.35) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004, h.21) yang menyimpulkan beberapa definisi pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.

- b. Pembangunan sebagai upaya sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *trancendental* sebagai *metadiscipliner*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara semakin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific and time specific*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk menjadikan atau mengerjakan sesuatu hal dengan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada sehingga berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*). Ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara, yaitu pertumbuhan, *welfare state*, neo ekonomi, *structuralize* dan *humanizing*. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu: pertumbuhan, kesejahteraan, dan *people centered*. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma "*people centered development*" (Ginandjar, 1996).

Pemberdayaan Masyarakat

Aziz (2005, h.135) dalam Huraerah (2008, h.88) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara *periodic* (terus-menerus).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap

masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.

- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan. Kartasamita (200, h.159) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2003, h.3). Menurut Lisa Harisson, pendekatan kualitatif berusaha menganalisis mengenai perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan (Moh Nazir, 1993, h.63). Salah satu karakteristik pendekatan kualitatif bahwa penelitian kualitatif sangat menekankan data asli atau *natural condition*. Dalam pendekatan kualitatif peneliti berinteraksi dengan informan dalam konteks yang alami (Arikunto, 2002, h.14)

Fokus penelitian terarah pada kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama serta

kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Produktifnya (UEP) dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam menguatkan kelembagaannya.

Lokasi Penelitian Terletak di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara beserta instrumennya. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu fakta empiris di lapangan, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Sedangkan untuk metode analisis data dilakukan melalui 4 tahapan :

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data (*display data*)
- d. Pengambilan keputusan atau verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa dawuhan dapat di ketahui bahwa Proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama didesa dawuhan diawali dengan tahap pengenalan yaitu dengan pembentukan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan proses pembentukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan terdapat tiga tahapan yaitu :

1. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyuluhan sosial dan kegiatan orientasi dan observasi.
2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi peninjauan lokasi dan pemetaan kebutuhan, kemudian bimbingan sosial dasar.
3. Tahap penyerahan bantuan.

Dari ketiga tahapan tersebut semuanya didominasi oleh pemerintah (Kemensos dan Dinas Sosial) hal ini terjadi karena pembentukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan adalah sebagai akibat dari program pemberdayaan fakir miskin yang dicanangkan pemerintah pusat atau Kemensos.

Menurut Pranarka dalam Prijono (1996) yang mengungkapkan bahwa ada 3 fase penting dalam proses pemberdayaan yaitu :

- 1) **Fase Initial**
- 2) **Fase Partisipatoris**
- 3) **Fase Emansipatoris**

Berkaitan dengan waktu dan tenaga, pada fase initial dan tahap penyadaran seperti yang diungkapkan Pranarka dalam Prijono (1996), bantuan yang bersifat stimulus pada program pemberdayaan fakir miskin atau program tahap

pertama akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar hal ini terlihat dari gagalnya 20 dari 30 kelompok usaha bersama yang telah terbentuk didesa dawuhan, hal ini berarti hanya 10 kelompok yang berhasil memenuhi indikator keberhasilan proses pengenalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sisi positif dari kegiatan ini adalah 10 kelompok terpilih yang kemudian akan menerima bantuan lanjutan telah siap untuk diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.

Kemudian untuk pengembangan kapasitas dan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak yang memberdayakan atau pelaku pemberdayaan menurut Suharto (1997) dalam Huraerah (2008, h.89) mengatakan bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu :

- 1) **Pemungkinan**
- 2) **Penguatan**
- 3) **Perlindungan**
- 4) **Penyokongan**
- 5) **Pemeliharaan**

Berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan diatas sampai saat ini metode yang dijalankan oleh pelaku pemberdayaan dalam hal ini dinas sosial kabupaten adalah penyokongan, perlindungan dan pemeliharaan sementara untuk pemungkinan dan penguatan diserahkan sepenuhnya kepada pendamping lapangan. Dimana langkah-langkah yang diambil oleh pendamping lapangan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok.
2. Sedangkan dalam administrasi keuangan terjadi penambahan pembukuan seperti Buku Rencana Kegiatan, Kartu Perkembangan Kesejahteraan Anggota KUBE, Buku Penerimaan Bantuan KUBE, Buku Kas, Buku Perkembangan dan Hasil UEP dan Buku Tamu dan Buku Anggota serta Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) yang besarnya antara 2000-5000 rupiah tiap kelompok dan administrasi kelompok sudah bersifat transparan.

Usaha peternakan sapi oleh kelompok usaha bersama di desa dawuhan masih diusahakan dengan cara pemeliharaan secara tradisional. Hal ini tergambar dari ciri-ciri usaha peternakan peternak responden yang sebagian besar sesuai seperti apa yang diungkapkan oleh

Diwyanto dkk (1995) yang dikutip Wirosuhardjo dan Priyanti (1997).

“Bahwa usaha peternakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan oleh skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usahanya bersifat pembibitan dan pembesaran.”

Lebih lanjut Wirosuhardjo dan Priyanti (1997) menjelaskan bahwa sistem usaha seperti tersebut belum memperhitungkan semua faktor input produksi seperti curahan tenaga kerja, keluarga, pakan (rumput) dan sewa lahan untuk bangunan kandang. Pemasaran produksi juga belum berdasarkan target penjualan, akan tetapi pada umumnya lebih ditentukan oleh kebutuhan akan uang tunai.

Gambaran seperti tersebut diatas ditunjukkan dari. Sementara itu didalam perkembangannya kelompok usaha tingkat penguasaan sapa usaha peternakan antara lain, pengetahuan tentang bibit, pengetahuan tentang pakan ternak, sistem pemeliharaan, cara pengembangbiakan ternak, pengetahuan tentang sistem perkandangan dan peralatan, pengetahuan tentang tatacara pencegahan penyakit, dan pola penanganan pasca panen dan pemasaran, serta jumlah ternak (Skala Usaha) bersama didesa dawuhan penguasaan sapa usaha peternakan masih sebatas pengetahuan tentang bibit, pakan ternak, sistem pemeliharaan dan cara pengembangbiakkan ternak, sedangkan untuk sistem peralatan dan perkandangan dan pencegahan penyakit masih dalam tahap pendidikan atau pelatihan yang masih sedang dijalankan oleh pendamping lapangan dan beberapa pihak lain dari dinas peternakan serta bantuan dari LSM setempat.

Sementara ini usaha yang dilakukan oleh pendamping lapangan adalah kemitraan. Kegiatan yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak selain pemerintah misalnya tokoh masyarakat yang memiliki modal dan Dinas Peternakan akan sangat membantu memfasilitasi atau memberikan akses kepada kelompok usaha bersama agar bisa bersaing memasarkan produk hasil dari usaha ekonomi produktif mereka.

Kemudian yang terakhir adalah tabungan anggota. Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dalam Huraerah (2008, h.90) dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.

3) Tingkat keberdayaan yang ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dilingkungannya.

4) Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

Dari ketiga kebutuhan dasar tersebut makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya atau didalam ilmu ekonomi biasa kita sebut sebagai konsumsi. Didalam rumus ekonomi pendapatan sama dengan konsumsi, dalam rumus ini berarti berapapun pendapatan yang dihasilkan sama dengan pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi.

Sedangkan fokus utama pendidikan mengenai tabungan untuk kelompok usaha bersama didesa dawuhan sementara ini masih diperuntukkan untuk anggota, dimana berdasarkan pengamatan peneliti kesadaran akan menabung sangat kurang atau dengan kata lain mereka menabung karena terpaksa dengan aturan yang ada didalam kelompok usaha bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Proses pemberdayaan masyarakat didesa dawuhan diawali dengan tahap pembentukan, kemudian pelaksanaan dan yang terakhir adalah tahap penyerahan bantuan. Ketiga tahapan ini masih dalam fase initial yang berarti bahwa pemberdayaan berasal dari pemerintah, pemerintah untuk menstimulus masyarakat didesa dawuhan agar mampu mengembangkan kapasitasnya melalui kelompok usaha bersama. pemerintah dalam hal ini kementrian dan dinas sosial baik kabupaten maupun provinsi menggabungkan paradigma *people centered development* atau pembangunan yang berpusat pada masyarakat dengan paradigma pertumbuhan sebagai strategi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat sasaran pemberdayaan didesa dawuhan. Untuk jangka pendek dari program pemberdayaan ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sasaran pemberdayaan

sedangkan untuk tujuan jangka panjang adalah peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat sasaran pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif dan kelembagaannya.

2. Sementara itu di temui banyak sekali permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok usaha bersama didesa dawuhan, yang pertama adalah permasalahan internal yaitu kesadaran minoritas anggota kelompok yang masih belum mampu untuk memahami dan menjalankan tujuan kelompok, kemudian dualisme pekerjaan yang dilakukan pendamping lapangan, kebudayaan dan lingkungan eksternal desa dawuhan yang kurang mendukung untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok serta pihak pemerintah yang masih kurang menunjukkan kualitas dalam intensitas pengawasan dilapangan.

Saran

Sedangkan untuk saran ada beberapa hal yang perlu disampaikan peneliti berkaitan dengan proses pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama di desa dawuhan kecamatan pocokusumo kabupaten malang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau proses pengenalan media pemberdayaan (KUBE), langkah yang diambil pemerintah sudah sangat bagus, hanya saja untuk didesa dawuhan terlalu banyak kelompok yang terbentuk, sehingga hal ini sangat tidak efektif dan

efisien. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah baik pusat maupun lokal agar melakukan pelatihan dan persiapan yang intensif kepada kelompok sasaran pemberdayaan sebelum bantuan atau modal pemberdayaan diberikan sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan modal oleh kelompok yang telah terbentuk.

2. Karena didalam hal ini pemberdayaan dianggap sebagai suatu proses yang berkelanjutan maka didalam pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sasaran pemberdayaan atau anggota dari kelompok usaha bersama seharusnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami kepada pendamping lapangan bukan sebaliknya. Untuk itu pendamping lapangan disini seharusnya bisa menstimulus masyarakat terutama dalam hal menemukan suatu permasalahan dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
3. Sedangkan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama, lebih diarahkan lagi kepada sapta usaha peternakan khususnya dalam hal sistem pemeliharaan, pengetahuan tentang sistem perkandangan dan peralatan, pengetahuan tentang tatacara pencegahan penyakit, dan pola penanganan pasca panen dan pemasaran, serta jumlah ternak (Skala Usaha).

Daftar Pustaka

- Agusta, I. 2002. *Assumption Of Empowerment At Workplace In Rural Indonesia*. Makalah : The XV th , International Sociological Association (ISA) Congress Of Sociology, Brisbane, Australia. 7-13 Juli 2002.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang. 2006. **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang**. Malang.
- Djojowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics Of Alternative Development*. Blackwell Publisher. Carbridge. Messachusetts, 02142 USA.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan – Anggota IKAPI.
- Isfa, M.Y. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Sumberdaya Manusia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, vol.3 no.2.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.
- Miles, Matthew dan Michel Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan Oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nawawi dan Martini. 2006. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Nazir, Moh. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indah.
- Prasojo, E. 2004. *People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. IV No. 2.
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strategi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi Metode R&D*. Bandung ; CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, Dan Pekerjaan Sosial : Spectrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Press.
- Suharto, Edi. 2003. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsep Dan Strategi*. International Policy Fellow Data Diakses Melalui www.policy.hu/suharto.
- Suharto, Edi. 2003. *Konsep Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya* www.policy.hu/suharto.
- Suharto, Edi . 2004. *Kemiskinan Dan Keberfungsian Sosial : Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Di Indonesia*. Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung ; PT. Refika Aditama.
- Sumarnonugroho, T. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Hanindita.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : UMM Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3S.
- Todano, Michael Et Al. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid II*. Jakarta : Erlangga.